

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hafni Sahir, Syafrida. 2022, Metodologi Penelitian, KBM Indonesia, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muhaimin. 2020, Metodologi Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram
- Nawawi, Hanawi. 1995, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono. 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit Universitas Indonesia, hlm.10.
- Soekanto, Soerjono. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, dalam Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suardi. 2005, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subagyo, Joko P. 2004, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

C. JURNAL

- Ananda Dwinanti Kinasih, M. Hudi Asrori, *“Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”*, Jurnal Hukum Privat, 2019, Vol. 7 No. 1.
- Asih Retno Dewi, Sutaryono, Alifia Nurhikmahwati, *“Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah Dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin)”*, Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2020, Vol. 6 No. 2.
- Agung Basuki Prasetyo, *“Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum”*, Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan, 2018, Vol. 1 No. 3.
- Danar Aswim, Abdullah Muis Kasim, Martha Florita, *“Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka”*, Jurnal Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Maret 2022, Vol. 10, No. 1.
- Edi Rohaedi, Isep H.Insan, Nadia Zumaro, *“Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”*, Jurnal Hukum Pakuan, 2019, Vol. 5 No. 1.
- Fauzan Rezki Pratama, Lince Magriasti, *“Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar”*, Jurnal Of Public Administration Studies, 2024, Vol. 3 No. 1.
- Hartana, Marta Cristina, *“Persengketaan-Persengketaan Tanah Di Indonesia”*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2019, Vol. 7 No. 3.
- Irene Lion Sanak Email, Sukardan Aloysiu, Darius Mauritsius, *“Penyelesaian Sengketa Tanah Antar Warga oleh Pemerintah Desa di Desa Tainsala Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara”*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Februari 2024, Vol. 2, No. 1.
- Istijab, *“Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria”*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, 2018, Vol. 1 No. 1.

- Maharani Nurdin, 2018, "*Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia*", Jurnal Hukum Positum, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm 127.
- Nanda Utama , Rahmi Murniwati, Tasman, "*Sengketa Sako dan Penyelesaian Oleh Peradilan Adat Nagari di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*", Jurnal Of Swara Justisia, 2023, Vol. 6 No. 4.
- Natasha Handayani Dewi, Dewa Gede Rudy, "*Implikasi Hukum Pengaturan Bank Tanah Sebagai Penyedia Pengadaan Tanah Berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tantang Cipta Kerja*" , Jurnal Kertha Wicara, 2022, Vol. 11 No. 9.
- Nur Azizah Raja, "*Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)*", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Januari 2019, Vol. 12, No. 1.
- Nurul Auliya, Rika Lestari, Ulfia Hasanah, "*Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*", Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, 2023, Vol. 2 No. 3.
- Odelia Christy Putri Tjandra, "*Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian*", 2021, Vol. 6 No. 2.
- Penta Trihandi , Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda, "*Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*", Jurnal Menara Ilmu, 2023, Vol. 17 No. 1.
- Rahmawati Firdaus, Hasbullah Malau, "*Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman*" , Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, 2020, Vol. 3 No. 4.
- Sarmen Aris, "*Kegagalan Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*" , Jurnal Marawa, 2024, Vol. 3 No. 1.
- Wayan Dedy Juniawan, Aulady Vandhika, Jovita Ramadhanti, Rensyaputra, "*Tantangan Kebijakan Penataan Spasial Pada Tanah Ulayat Adat : Studi Kasus di Provinsi Bali*" , Jurnal Unhas, 2022, Vol. 2 No. 2.
- Widelia Andiani Nadiffa, Beni Ahmad Saebani, "*Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi*", Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2024, Vol. 9 No. 2.

D. SKRIPSI

- Erma Windasari, 2017, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bambapuang Kab. Enrekang", Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.

E. INTERNET

- Detik.com, "*Sengketa Tanah*", <https://www.detik.com/properti/tips-dan-panduan/d-7322589/sengketa-tanah-pengertian-jenis-kasus-dan-penyebabnya> , dikunjungi pada tanggal 28 Oktober 2024 Jam 01.30.
- Sumbarheadline, "*Masyarakat Adat Nagari Sungai Kamuyang Limapuluh Kota Gugat Sertifikat HPL Diatas Tanah Ulayat*", <https://sumbarheadline.com/masyarakat->

adat-nagari-sungai-kamuyang-limapuluh-kota-gugat-sertifikat-hpl-diatas-tanah-ulayat/ , dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2024 Jam 22.33.

Wikipedia, “*Nagari*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari> , dikunjungi pada tanggal 4 Juni 2024 Jam 17.17.

Wikipedia, “*Mediasi*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi> , dikunjungi pada tanggal 2 Januari 2025 Jam 21.30.

Wikipedia, “*Tanah Ulayat*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat , dikunjungi pada tanggal 27 Januari 2025 Jam 23.30.

Website resmi nagari parit malintang “*Profil Nagari Parit malintang*” <https://paritmalintang.padangpariamankab.go.id/index.php/artikel/2019/7/29/profil-nagari-parit-malintang-kecamatan-enam-lingkung-kabupaten-padang-pariaman-provinsi-sumatera-b> , dikunjungi pada tanggal 3 Juni 2025 Jam 21.00.

